

Iyan Fathul Khoeriyah

Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: iyanfkhoeiriyah@yahoo.com

Achmad Nurmandi

Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Uni-
versitas Muhammadiyah Yogyakarta
dan Direktur Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Email: nurmandi_achmad@gmail.com

[http://dx.doi.org/10.18196/
jgpp.2014.0008](http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2014.0008)

Evaluasi Program Wajib Belajar 9 Tahun Pada Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta

(Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri dan
Sekolah Dasar Muhammadiyah
di Kota Yogyakarta)

ABSTRACT

The research aimed to acknowledge the evaluated of compulsory 9-year assurance in state elementary school (SDN) and private elementary school (Muhammadiyah) in the city of Yogyakarta. Data Analysis Unit in this research is head education section in elementary school at the city of Yogyakarta, head master, teacher, scholl committee and students, 4 from state elementary school (SDN) and 4 from private elementary school (Muhammadiyah) in the city of Yogyakarta. This research used method with data collection from the data analysis process based on the result of in depth interview and documents. This study used descriptive and qualitative data with grounded theory method. The research result is the number of suitably qualified educational personnel do not achieve the target of only 40%. Then the number of students who were subjected to compulsory quota admission of new students in SDN and elementary schools still have not meet the target. Facilities and infrastructure and Private Elementary School has not fully meet the prescribed standards, and sources of funding / budget, State elementary school (SDN) funding sourced from Regional Government Budget (APBD) and State Budget (APBN). While private elementary school funding sourced from Regional Government Budget (APBD) and State Budget (APBN) and from (donations parents, fees, dues Sacrifice, building development money, charity / special assistance). Elementary School does not collect tuition while still attracting private primary schools charge tuition of students for a nominal amount of each school is different. The average value of private elementary school graduation is more higher than the state elementary school (SDN). Increase (CCDMA) in the city of Yogyakarta is equal to 92% have been achieved target And (APTs) are on state elementary school (SDN) Patangpuluhan by 0,01% and the SD Muhammadiyah Purwodiningratan 1 by 0,01%.

Keywords: Evaluation of policy, education, compulsory education program

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi program wajib belajar 9 tahun pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Dasar Swasta (Muhammadiyah) di Kota Yogyakarta. Unit analisis data dalam penelitian ini adalah Kepala bagian pendidikan Sekolah dasar Kota Yogyakarta, Kepala Sekolah, guru, komite Sekolah dan siswa. 4 Sekolah dasar negeri dan 4 Sekolah dasar swasta di Kota Yogyakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode Grounded Theory. Hasil penelitian yaitu jumlah tenaga pendidikan sesuai kualifikasi tidak mencapai target hanya 40%. Kemudian kuota penerimaan peserta didik baru di SDN dan Sekolah SD masih ada yang belum memenuhi target. Sarana dan prasarana SDN dan Swasta belum sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditentukan, dan sumber dana/anggaran, di SDN bersumber dari (APBD) dan (APBN). Sedangkan SD Swasta bersumber dari (APBD) dan (APBN) selain itu berasal dari (sumbangan orang tua, SPP, Iuran Qurban, uang pengembangan gedung, amal jariah/bantuan khusus). Penanggung jawab/program tim wajib belajar, dalam pelaksanaannya tidak ada tim khusus di

SDN dan SD Swasta. Waktu pelaksanaan program wajib belajar di SDN dan Swasta mengikuti jadwal kelender pendidikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hasil kelulusan UN di Kota Yogyakarta untuk SDN dan Swasta mencapai 100%. Sekolah SDN tidak memungut SPP sedangkan SD Swasta masih menarik biaya SPP dari siswa, untuk besaran nominalnya setiap Sekolah berbeda-beda. Nilai rata-rata kelulusan SD Swasta lebih tinggi dibandingkan dengan SDN. Peningkatan (APK) di Kota Yogyakarta adalah sebesar 92% telah mencapai target. Dan (APTs) terdapat pada SDN Patangpuluhan sebesar 0,01% dan pada SD Muhammadiyah Purwodiningratan 1 sebesar 0,01%.

Kata Kunci: Evaluasi kebijakan, Pendidikan, Program wajib belajar.

PENDAHULUAN

Kebijakan bidang pendidikan merupakan salah satu dari Wilayah kekuasaan Negara. Mengikuti konsep keadilan distributif John Rawls (1999) pemerintah sudah semestinya memainkan peran-peran yang adil dalam mendistribusikan sumber daya dan sumber dana bagi seluruh warga Negeranya. Dilihat dari sejarah persekolahan modern di Indonesia, sampai hari ini pemerintah Indonesia masih belum mampu menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warganya. Semenjak masa pra-kemerdekaan, kontribusi sektor swasta dalam menyediakan pelayanan pendidikan sangatlah besar (Sirozi, 2004). Keadilan distributif bagi seluruh warga negara Indonesia sejauh ini masih ada pada tataran idealisme. Di satu sisi, pemerintah tidak cukup mendistribusikan sumber dana dan sumber daya yang adil bagi Sekolah-sekolah Swasta dan Negeri. Di lain pihak, pemerintah seringkali mengeluarkan berbagai peraturan dan perundangan yang memberatkan dan mempersulit kinerja Sekolah-sekolah Swasta (Budiraharjo dkk, 2013: 5).

Pendidikan menurut Jeki (2011: 2) merupakan salah satu aspek terpenting bagi pembangunan bangsa. Menyadari hal tersebut pada tahun 1994 telah dimulai program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang didasari konsep "Pendidikan dasar untuk semua" (*universal basic education*), yang pada hakekatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk semua anak. Hal ini lebih tegas telah diatur dalam UUD 1945 pasal 31 yaitu "Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran".

Langkah pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pemerataan pendidikan, menurut Udin (2008: 9) yaitu dengan

192 penancangan program wajib belajar sembilan tahun yakni Sekolah Dasar (SD) 6 tahun dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) selama 3 tahun. Kebijakan ini disebut sebagai upaya menerapkan pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh seluruh Bangsa Indonesia yang erat kaitannya dengan gerakan “melek” huruf dan masyarakat belajar.

Selanjutnya Menurut Jeki (2011: 2) Melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun diharapkan dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang perlu dimiliki semua warga Negara sebagai bekal untuk dapat hidup dengan layak di masyarakat dan dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi baik ke lembaga pendidikan Sekolah ataupun luar Sekolah. Berbagai macam program dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun telah dilaksanakan, tetapi masih saja ditemui anak yang putus Sekolah pada usia wajib belajar 9 tahun.

Berdasarkan data dari (BPS Kota Yogyakarta dalam angka, 2013) angka putus Sekolah mencerminkan jumlah penduduk usia Sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan pendidikan pada jenjang tertentu (drop out). Pada tahun ajaran 2012/2013, jumlah murid yang putus Sekolah di DIY mencapai 1.160 siswa, terdiri dari 1.053 siswa dari Sekolah yang berada di bawah naungan Diknas dan 107 siswa dari Sekolah yang berada di bawah naungan non Diknas. Jumlah tersebut meningkat sebesar 0,96 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 1.149 orang siswa.

Penyebab putus Sekolah berdasarkan Data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan (DISDIK) Kota Yogyakarta (2013: 18) sangat beragam dan tergantung dari jenjang pendidikan yang diikuti, diantaranya adalah rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan orang tua, kondisi sosial ekonomi keluarga, keterbatasan serta kesulitan dalam mengakses infrastruktur pendidikan atau karena siswa tidak mampu

mengikuti pelajaran.

Dengan demikian maka, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana evaluasi program wajib belajar 9 tahun yang dilaksanakan di Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta di Kota Yogyakarta. Alasan peneliti mengambil penelitian ini adalah karena berdasarkan informasi bahwa jaminan wajib belajar 9 tahun masih mengalami kendala dan banyak permasalahan yang dihadapi, masih adanya Angka Putus Sekolah (APTs) di jenjang Sekolah Dasar, banyak anak yang keluar dari Sekolah dikarenakan terkendala ekonomi, kesetaraan pendidikan masih belum terpenuhi, diskriminasi atas pendidikan masih banyak terjadi, himpitan antara Sekolah Swasta dan Sekolah Negeri menimbulkan persoalan di Kota Yogyakarta.

Kemudian berdasarkan data BPS Kota Yogyakarta dalam angka tahun 2013 bahwa jumlah Sekolah yang ada yaitu untuk Sekolah Dasar Negeri 92 dan Sekolah Dasar Swasta 74. dalam penelitian ini akan diambil 8 Sekolah dari total jumlah Sekolah yang ada yaitu untuk Sekolah Dasar Negeri 4 dan untuk Sekolah Dasar Swasta (muhammadiyah) 4. Berdasarkan pertimbangan: (1) Derajat kapasitas stakeholders Sekolah, (2) lokasi, Wilayah sesuai mata angin dua Sekolah baik Negeri maupun Swasta berada di Wilayah utara, dua Sekolah berada di Wilayah selatan, dua Sekolah berada di Wilayah timur dan dua Sekolah berada di Wilayah barat. (3) komposisi Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta (muhammadiyah), dan (4) ketersediaan dana dan SDM, alasan peneliti memilih Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yaitu untuk membandingkan terhadap pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun pada Sekolah Dasar dan kemudian alasan saya memilih Sekolah Dasar Swasta (muhammadiyah) karena komposisi Sekolah Dasar (muhammadiyah) lebih mendominasi dibandingkan dengan Sekolah Dasar Swasta lain yang ada di Kota Yogyakarta.

194 **KERANGKA TEORI** PROGRAM DAN EVALUASI PROGRAM WAJIB BELAJAR

Menurut Arikunto Ada dua pengertian untuk istilah program yaitu pengertian secara khusus dan umum (Arikunto, 2014: 3-4). Dijelaskan lagi oleh Arikunto bahwa program secara umum dapat diartikan sebagai rencana. Sementara secara khususnya, apabila program ini langsung dikaitkan dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Lebih lanjut menurut Arikunto (2014: 4) menambahkan bahwa “Program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan. Berdasarkan pengertian itu maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi berkesinambungan”. Dijelaskan lebih lanjut lagi menurut Arikunto (2014) dalam menentukan sebuah program atau rencana kegiatan penting untuk memperhatikan hal-hal berikut yaitu: 1) realisasi atau implementasi suatu kebijakan; 2) terjadi dalam waktu yang relatif lama bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan; dan 3) terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Disamping itu bahwa dalam melaksanakan sebuah program perlu kiranya untuk melakukan penilaian terhadap program tersebut yakni dengan melihat hasilnya apakah sesuai dengan rencana program yang telah disusun. Terkait hal ini, Arikunto (2014: 2) juga menambahkan mengenai apa itu evaluasi. Menurutnyanya “Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan”.

Selain informasi yang digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan perlu ada tahapan

waktu menurut Posavac (2014: 12) menjelaskan bahwa tahapan waktu yang dibutuhkan agar proses evaluasi berjalan dengan baik yaitu: 1) *Short term needs*, 2) *Long term needs*, 3) *Potencial needs*.

Lebih jauh lagi terkait dengan evaluasi bahwa disisi lain menurut pendapat Posavac (2014: 1) bahwa evaluasi program adalah:

“Program evaluation is a methodology to learn the depth and extent of need for a human service and whether the service is likely to be used whether the service is sufficiently intensive to meet the unmet needs identified and the degree to which the service is offered as planned and actually does help people in need at a reasonable cost, without unacceptable side effects. Utilizing research methods and concepts from psychology, sociology, administration and policy sciences, economics’ and education, program evaluators seek to contribute to the improvement of programs”.

Berdasarkan pernyataan diatas evaluasi program menurut pendapat Posavac (2014: 1) bahwa evaluasi program merupakan sebuah metode untuk mempelajari berapa dalam dan luasnya layanan yang mereka butuhkan, dan apakah layanan ini mungkin bisa digunakan, apakah layanan-layanan cukup untuk menemukan sesuatu yang tidak dibutuhkan, dan ukuran untuk layanan yang ditawarkan sebagai rencana dan sebenarnya untuk membantu kebutuhan pada biaya yang layak.

Dalam ilmu evaluasi program pendidikan, ada banyak model yang bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu program. Ada beberapa ahli evaluasi program yang dikenal sebagai penemu model evaluasi program, yaitu Stufflebeam, Metfessel, Michael Scriven, Tayler, Stake dan Glaser. Kaufman dan Thomas membedakan model evaluasi menjadi delapan, yaitu:

Adapun beberapa model evaluasi program menurut Kaufan dan Thomas dalam Arikunto (2014: 40-41) yang membedakan model evaluasi program menjadi delapan, yaitu:

- 1) *Goal Oriented Eavaluation Model*, dikembangkan oleh Tyler.
- 2) *Goal Free Eavaluation Model*, dikembangkan oleh Scriven
- 3) *Formatif Summatif Evaluation Model*, dikembangkan oleh Michel Scriven.
- 4) *Countenance Evaluation Model*, Model ini dikembangkan oleh Stake
- 5) *Responsif Evaluation Model*, Model ini dikembangkan oleh Stake
- 6) *SSE-UCLA Evaluation Model*, menekankan pada “kapan” evaluasi dilakukan
- 7) *CIPP Evaluation Model*, yang dikembangkan oleh Stufflebeam
- 8) *Discrepancy Model*, yang dikembangkan oleh Provus

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode *Grounded Theory*. Menurut Creswell (2009) dikutip dalam Sugiyono (2012: 14), *Grounded* adalah merupakan salah satu jenis metode kualitatif, dimana peneliti dapat menarik generalisasi (apa yang diamati secara induktif), teori yang abstrak tentang proses, tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan dari partisipan yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi program wajib belajar 9 tahun pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta (muhammadiyah) di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan di dinas pendidikan Kota Yogyakarta dan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta. Untuk Sekolah Dasar Swasta dipilih Sekolah Dasar Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. Pemilihan lokasi tersebut ditentukan dengan metode *Purposive sampling*. *Sampling Purposif* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 126). Selanjutnya penentuan Sekolah yang menjadi sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *Purposive sampling* dengan memperhatikan Wilayah sesuai mata angin. Dua Sekolah baik Negeri maupun Swasta berada

TABEL 1. PERATURAN-PERATURAN TENTANG PROGRAM WAJIB BELAJAR

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	NOMOR DAN TAHUN	TENTANG
Undang-undang (UU)	Nomor 20 Tahun 2003	Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengamankan Setiap Warga Negara Yang Berusia 7-15 Tahun Wajib Mengikuti Pendidikan Dasar.
Peraturan Pemerintah (PP)	Nomor 38 Tahun 2007	Ten tang Pembagaian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.
Peraturan Menteri	Nomor 47 Tahun 2008	Tentang Wajib Belajar.
	Permendagri Nomor 62 Tahun 2011	Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah.
	Permenkeu Nomor 201/PMK.07/2013	Tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS Tahun Anggaran 2014.
	Permenpan Nomor 37 Tahun 2010	Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bos Tahun Anggaran 2011.
	Permenpan Nomor 101 tahun 2013	Tentang Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014.
	Permenpan Nomor 76 Tahun 2012	Tentang Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013.
Petunjuk Teknis (Juknis)	Juknis Tahun 2014	Tentang Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014.

Sumber: Olahan Data Primer: 2014

di Wilayah utara, dua Sekolah berada di Wilayah selatan, dua Sekolah berada di Wilayah timur dan dua Sekolah berada di Wilayah barat.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas teknik observasi, dokumentasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini akan dipilih 8 Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta (muhammadiyah) yang dipilih berdasarkan pertimbangan: (1) Derajat kapasitas stakeholders Sekolah, (2) lokasi, (3) komposisi Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar swasta (muhammadiyah) dan (4) ketersediaan dana dan SDM, alasan memilih Sekolah Dasar Swasta (muhammadiyah) karena komposisi Sekolah Dasar Swasta (muhammadiyah) lebih mendominasi

198 dibandingkan dengan Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kota Yogyakarta.

PEMBAHASAN

Evaluasi program wajib belajar 9 tahun pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Dasar Swasta (Muhammadiyah) di Kota Yogyakarta.

CONTEXT EVALUATION (EVALUASI KONTEKS)

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SECARA TEGAS MENGATUR PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN.

Pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun secara tegas dan jelas dituangkan dalam peraturan perundang-undangan terkait tentang bagaimana pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Adapun peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut (lihat tabel 1):

Berdasarkan tabel tersebut bahwa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam melaksanakan amanat undang-undang tentang program wajib belajar 9 tahun, peningkatan akses pendidikan oleh masyarakat yang membutuhkan yakni dengan mengelola regulasi yang sudah ada dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dan membuat regulasi baru di tataran Daerah untuk mengatur pengelolaan dana bantuan pendidikan.

B. PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN SECARA TEGAS DAN JELAS DITUANGKAN DALAM ATURAN YANG DIBUAT OLEH PEMERINTAH DAERAH

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur program wajib belajar 9 tahun ada juga yang diatur oleh pemerintah Daerah terutama pemerintah Kota Yogyakarta melalui peraturan Daerah dan peraturan Walikota cukup jelas. Adapun peraturan Daerah yang mengatur program wajib belajar 9 tahun yakni sebagai berikut:

TABEL 2. PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BELAJAR

Peraturan perundang-undangan	Nomor dan Tahun	Tentang
Peraturan Daerah (Perda)	Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007	Tentang PPIPD YK 2005-2025 Minimal Pendidikan Menengah
	Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008	Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
Peraturan Wali Kota (Perwal)	Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2014	Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan
	Nomor 71 Tahun 2008	Tentang Rintug Dinsdik Tahun 2009

Sumber: Olahan Data Primer: 2014

Selain beberapa peraturan Daerah tersebut ada juga Petunjuk Teknis (JUKNIS) pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dibuat setiap tahunnya. Pada proses pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam melaksanakan program wajib belajar 9 tahun pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar telah sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Pada proses pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam melaksanakan program wajib belajar 9 tahun pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar telah sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

C. DINAS PENDIDIKAN BELUM SEPENUHNYA MELAKSANAKAN AMANAT UNDANG-UNDANG TENTANG PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN

Teridentifikasinya konteks-konteks yang belum terpenuhi merupakan bagian dari apa saja hal-hal yang belum terpenuhi dalam melaksanakan program wajib belajar 9 tahun di Kota Yogyakarta. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, ada beberapa konteks yang belum terpenuhi terkait pelaksanaan program wajib belajar yaitu sebagaimana dapat dilihat lebih rinci dalam tabel berikut ini:

TABEL 3 KONTEKS YANG BELUM TERCAPAI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR

Konteks	Rencana			Realisasi		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Tingkat Lulusan UN	87%	90%	93%	86%	88%	93%
Rerata UN	7,65%	7,70%	7,75%	7,55%	7,70%	7,75%
Jumlah Sekolah Terakreditasi	97%	98%	98%	96%	98%	98,5%
Jumlah Sarpras Terstandar	74%	80%	85%	65%	75%	85%
Jumlah Tenaga Pendidikan Sesuai Kualifikasi	30%	40%	50%	30%	35%	40%
Jumlah Sekolah yang Terstandar Nasional (SSN)	90,3%	91%	92%	90%	91%	92%

Sumber: Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2014

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan hal-hal yang tidak tercapai targetnya sebagai berikut:

1. Konteks Tingkat Lulusan Ujian Nasional rencana dari tahun 2012 sampai tahun 2013 tidak mencapai target. Sementara tingkat kelulusan ujian nasional tahun 2014 tercapai.
2. Konteks Rerata Ujian Nasional tahun 2012 tidak mencapai target namun di tahun selanjutnya 2013 dan 2014 sudah mencapai target. Ada banyak faktor mempengaruhi hingga hal ini terjadi diantaranya yaitu tingginya disparitas kompetensi guru negeri dan Swasta serta kurang efektifnya pemantauan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) oleh pengawas karena jumlahnya masih jauh dari ideal. Ketimpangan kompetensi guru cukup tinggi sehingga juga berdampak pada tingginya rerata nilai Ujian Nasional (UN) antara Sekolah Negeri Dan Swasta.
3. Konteks Jumlah Sekolah Terakreditasi tahun 2012 tidak mencapai target namun di tahun selanjutnya 2013 dan 2014 sudah mencapai target.
4. Konteks Jumlah SARPRAS Terstandar dua tahun berturut-turut tidak mencapai target yakni tahun 2012-2013 sementara untuk

tahun selanjutnya tahun 2014 sudah mencapai target.

5. Konteks Jumlah Tenaga Pendidikan Sesuai Kualifikasi tercapai targetnya pada tahun 2012 sementara dua tahun berturut-turut tidak mencapai target.
6. Konteks Jumlah Sekolah yang Terstandar Nasional (SSN) tahun 2012 tidak mencapai target sementara itu dua tahun berturut-turut yakni tahun 2013-2014 mencapai target.

D. TERPENUHI KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Adapun jumlah kuota penerimaan siswa baru yang menjadi sasaran wajib belajar pada Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Kota Yogyakarta lebih rinci dijelaskan dalam tabel berikut ini:

TABEL 4. KUOTA SISWA BARU YANG MENDAFTAR

Sekolah Negeri	Jumlah Siswa yang mendaftar	Sekolah Swasta	Jumlah Siswa yang mendaftar
SDN Suryowijayan	25	SD Muhammadiyah Jogokariyan	28
SDN Patangpuluhan	21	SD Muhammadiyah Purwodiningratan1	40
SDN Jetisharjo	56	SD Muhammadiyah Gendeng	64
SDN Gedongkuning	89	SD Muhammadiyah Miliran	30

Sumber: Olahan Data Primer: 2014

Berdasarkan tabel tersebut bahwa kuota penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar Negeri (SDN) ternyata masih ada dua Sekolah yang belum memenuhi target untuk kuota penerimaan siswa baru. Yaitu pada Sekolah Dasar Negeri Patangpuluhan siswa yang mendaftar hanya 21 orang. Hal tersebut disebabkan oleh letak lokasi Sekolah yang kurang strategis dan sehingga sulit dijangkau. Sedangkan pada Sekolah Dasar Negeri Suryowijayan siswa yang mendaftar hanya 25 orang. Sedangkan dua Sekolah yang sudah memenuhi target untuk kuota penerimaan siswa baru. Yaitu pada SDN Gedongkuning dan Sekolah SDN Jetisharjo Sekolah ini

202 lokasinya sangat strategis mudah dijangkau dan mudah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Sedangkan kuota penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar Swasta ternyata masih ada Sekolah yang belum memenuhi target untuk kuota penerimaan siswa baru. Yaitu pada Sekolah Dasar Muhammadiyah Jogokaryan yang mendaftar hanya 28 orang. Oleh karena itu Sekolah yang lokasinya strategis dan dekat pemukiman warga akan banyak siswa baru yang mendaftar. Inilah salah satu alasan tidak sepenuhnya terpenuhinya kuota dalam penerimaan siswa baru di Sekolah Dasar Swasta.

E. TERLAKSANANYA KESEMPATAN UNTUK MEMPEROLEH
PENDIDIKAN YANG SAMA TERHADAP PESERTA DIDIK DARI
KELUARGA MISKIN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar dalam bab IV pasal 9 Penjaminan Wajib Belajar ayat (4) yang berbunyi “Warga Negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan”. Sekolah Dasar Negeri (SDN) ini tidak ada perbedaan perlakuan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan terhadap peserta didik dari keluarga miskin yaitu dengan diberlakukannya Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) bagi siswa pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui jalur Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) peserta KMS yaitu khusus untuk warga atau siswa yang kurang mampu dan berasal dari Kota Yogyakarta bukan untuk siswa yang berasal dari kabupaten Sleman dan Bantul. Begitu juga dengan Sekolah Dasar Swasta kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sama terhadap peserta didik baik dari kalangan mampu (kaya) maupun kalangan tidak mampu (miskin) tidak ada perbedaan.

F. PEMERINTAH DAERAH DAN SEKOLAH MEMPUNYAI TARGET
PENCAPAIAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan program wajib belajar sesuai dengan pedoman yang ada. Guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta telah mengalokasikan anggaran dalam DPPA-SKPD tahun 2013 total sebesar Rp. 537.671.832.690,- (Lakip Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2013).

Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan komitmen, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini.

TABEL 5. TARGET PENCAPAIAN PROGRAM WAJIB BELAJAR TAHUN 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	91	92	101,09

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2013

Berdasarkan tabel tersebut bahwa target pencapaian program wajib belajar tahun 2013 target Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu 91%, realisasi 92%. Artinya bahwa target pencapaian sudah terrealisasikan. Selain target yang terdapat pada tabel tersebut Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga menargetkan pada tahun 2015 seluruh jenjang, kelas 1 sampai dengan kelas 6 Sekolah Dasar (SD) di seluruh Indonesia telah menerapkan kurikulum 2013. Adapun target pencapaian program wajib belajar pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta (Muhammadiyah) yaitu semua anak kelas enam lulus ujian Nasional 100%, tidak ada anak yang putus Sekolah.

G. PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DILAKSANAKAN UNTUK MEMPERLUAS CAKUPAN PENDIDIKAN DASAR TERHADAP WARGA NEGARA

Sebagai salah satu tujuan dan fungsi wajib belajar terdapat dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) “Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara Indonesia. Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga Negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi”. Dengan demikian tujuan wajib belajar 9 tahun dapat dijabarkan sebagai berikut yaitu 1) terwujudnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan; 2) Mewujudkan pendidikan untuk semua atau *Education For All* (EFA).

Program wajib belajar 9 tahun dilaksanakan untuk memperluas cakupan pendidikan dasar terhadap warga Negara berdasarkan tujuan dan fungsi wajib belajar sudah menyeluruh semua lini dan Sekolah Swasta tidak boleh menolak anak miskin.

INPUT EVALUATION (EVALUASI MASUKAN)

a. Guru mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan program wajib belajar

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga Negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang guru).

b. Kesesuaian keahlian guru dengan mata pelajaran seimbang
Sumber daya manusia yang ada di Sekolah Dasar Negeri dan

Muhammadiyah di Kota Yogyakarta sebagian besar berkualifikasi Strata 1 dan ada juga yang Diploma IV. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Sekolah Dasar Negeri dan Muhammadiyah di Kota Yogyakarta jumlah guru dengan keahlian tertentu sudah seimbang dengan jumlah mata pelajaran.

- c. Dinas Pendidikan dan Sekolah bertanggungjawab terhadap upaya meningkatkan kualitas guru melalui pendidikan dan pelatihan rutin

Dinas Pendidikan mempunyai tanggungjawab penuh terhadap upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara rutin. Sebagaimana Selalu ada peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan workshop, training dan seminar. Kemudian Sekolah seutuhnya mempunyai tanggungjawab terhadap upaya meningkatkan kualitas guru melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara rutin. Sekolah Negeri dan Swasta (muhammadiyah) ini mempunyai tanggungjawab penuh terhadap upaya meningkatkan kualitas guru melalui pendidikan dan pelatihan rutin, Kelompok Kerja Guru (KKG) yang dilakukan setiap satu bulan sekali, workshop serta diklat.

- d. Fasilitas Sekolah memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan dasar

Sedangkan untuk sarana dan prasarana, yaitu seperti fasilitas Sekolah yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan dasar, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar

mengajar belum terpenuhi. Seperti alat bantu seperti LCD untuk saat ini menjadi kebutuhan dalam melakukan kegiatan belajar dikelas. Walaupun alat bantu tersebut masih sangat jarang digunakan di Sekolah-sekolah, namun saat ini sesuai dengan perkembangan zaman sehingga alat bantu tersebut perlu diadakan untuk mempermudah pelaksanaan proses belajar mengajar. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sarana dan prasarana di Sekolah dasar negeri dan Sekolah dasar Swasta belum semuanya terpenuhi.

- e. Tersedianya buku-buku sebagai penunjang pelaksanaan program wajib belajar

Kemudian tersedianya buku-buku sebagai penunjang pelaksanaan program wajib belajar pada Sekolah yang belum terpenuhi dan ada Sekolah yang sudah terpenuhi. Sekolah Dasar Negeri buku penunjang dan buku teks siswa di Sekolah Dasar Negeri ada Sekolah yang belum terpenuhi ratio satu anak satu buku, namun baru beberapa mata pelajaran saja. Sedangkan pada Sekolah swasta keadaan buku-buku di SD Muhammadiyah ini sebagai penunjang pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun ada buku yang wajib dimiliki oleh siswa dan ada buku penunjang KBM. Ketersediaan buku-buku pelajaran sebagai penunjang pelaksanaan program wajib belajar sebagian besar sudah terpenuhi. Masing-masing siswa yang Sekolah di Sekolah Dasar Swasta Muhammadiyah memiliki buku mata pelajaran dan buku penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

- f. Kurikulum pendidikan dasar memadai

Selain itu kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Saat ini Sekolah Dasar baik Negeri maupun Swasta sudah memadai untuk kelas 3

dan 6 masih menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

207

Kemudian untuk kurikulum baru yang telah digulirkan sejak tahun 2013 yang lalu, pada tahun pelajaran 2014/2015 ini akan diterapkan pada kelas 1, 2, 4, dan 5 Sekolah Dasar (SD) di seluruh Indonesia. Tahun sebelumnya, Kurikulum 2013 hanya diterapkan pada kelas 1 dan 4 Sekolah Dasar (SD) di Sekolah terpilih saja. Ditargetkan pada tahun 2015 seluruh jenjang, kelas 1 sampai 6 Sekolah Dasar/ (SD) di seluruh Indonesia telah menerapkan 2013.

g. Sumber Dana/anggaran

Sumber dana di Sekolah Dasar Negeri yaitu bersumber dari dana APBN (BOS), BOSDA Propinsi, dan dana APBD Kota Yogyakarta. Sumber dana pendapatan terbanyak yaitu SDN Gedongkuning Rp. 2.144.894.312. Sedangkan pada Sekolah Dasar Swasta (Muhammadiyah) Sumber dana pendapatan terbanyak yaitu SD Muhammadiyah Gendeng Rp. 635.929.700. Berbeda dengan Sekolah Dasar Negeri yang hanya bersumber dari dana APBN dan dana APBD, sumber pendapatan Sekolah Swasta yaitu bersumber dari dana APBN (BOS), BOSDA Propinsi, dana APBD Kota Yogyakarta selain itu bersumber dari pendapatan asli Sekolah, SPP, Infaq Qurban, koperasi, donasi, uang pembangunan gedung.

Setelah digulirkannya dana BOS Pusat, maka pemasukan dana dari masyarakat di Sekolah Swasta yang kecil semakin minim, dan kondisi ini lebih diperburuk dengan minimnya dana BOS yang diterima karena jumlah siswa yang sedikit, Disamping masalah BOS Pusat yang kecil DAK untuk pembangunan gedung atau rehap kelas tidak menyentuh pada Sekolah Swasta, sehingga kondisi sarana dan prasarana di Sekolah Swasta tersebut belum memenuhi standar.

Sumber dana di Sekolah Dasar Negeri yaitu bersumber dari dana APBN (BOS), BOSDA Propinsi, dan dana APBD Kota Yogyakarta. Sumber dana pendapatan terbanyak yaitu SDN Gedongkuning Rp.

2.144.894.312. Sedangkan pada Sekolah Dasar Swasta (Muhammadiyah) Sumber dana pendapatan terbanyak yaitu SD Muhammadiyah Gendeng Rp. 635.929.700. Berbeda dengan Sekolah Dasar Negeri yang hanya bersumber dari dana APBN dan dana APBD, sumber pendapatan Sekolah Swasta yaitu bersumber dari dana APBN (BOS), BOSDA Propinsi, dana APBD Kota Yogyakarta selain itu bersumber dari dana masyarakat (SPP, Infaq Qurban, koperasi, donasi, uang pembangunan gedung).

Setelah digulirkannya dana BOS Pusat, maka pemasukan dana dari masyarakat di Sekolah Swasta yang kecil semakin minim, dan kondisi ini lebih diperburuk dengan minimnya dana BOS yang diterima karena jumlah siswa yang sedikit, seperti di Sekolah dasar Muhammadiyah Miliran, Disamping masalah BOS Pusat yang kecil DAK untuk pembangunan gedung atau rehap kelas tidak menyentuh pada Sekolah Swasta, sehingga kondisi sarana dan prasarana di Sekolah Swasta tersebut belum memenuhi standar.

Berdasarkan rincian sumber dana bantuan dari pemerintah tersebut bahwa rata-rata jumlah pendapatan Sekolah Dasar Negeri sebesar Rp. 1.182.238.615,- sedangkan Sekolah Dasar Swasta (Muhammadiyah) rata-rata jumlah pendapatan sumber dana bantuan dari pemerintah yaitu sebesar Rp. 236.851.075,- berdasarkan jumlah rata-rata tersebut bahwa pendapatan Sekolah Dasar Negeri lebih besar dibandingkan dengan Sekolah Swasta.

Bahwa Sekolah Dasar Negeri pada pembiayaan untuk proses belajar mengajar hanya bergantung pada dana yang dialokasikan oleh Pemerintah saja sehingga pembiayaan dalam pelaksanaan untuk memenuhi sarana dan prasarana tidak mencukupi, apalagi Sekolah yang jumlah siswanya sedikit itu sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah yang di berikan kepada Sekolah tersebut.

Namun di Sekolah Dasar lainnya Sumber dana/ anggaran yang digunakan Sekolah untuk menyelenggarakan program wajib belajar

9 tahun di Kota Yogyakarta sudah mencukupi. Berbeda halnya dengan Sekolah Dasar Negeri. Sekolah Dasar Swasta menganggap bahwa alokasi dana BOS yang diberikan ke masing-masing Sekolah yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan Sekolah sebagai penunjang proses belajar dan mengajar di anggap telah mencukupi. Karena di Sekolah Swasta tidak hanya mengharapkan dana dari Pemerintah. Untuk sumber dana Sekolah Swasta memiliki sumber dana dengan komposisi bervariasi yaitu bersumber dari SPP dan lain-lain. Adapun perbandingan belanja dan defisit/siswa di Sekolah Dasar Swasta (Muhammadiyah) sebagai berikut:

TABEL 6 SUMBER DAN ADAN DEFISIT/SISWA SEKOLAH SWASTA

Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Sumber Dana	Jumlah	Defisit/ siswa
SD Muh. Jogokariyan	88	Dana Masyarakat	100.819.950	1.145.681
SD Muh. Purwodiningratan 1	139	Dana Masyarakat	174.900.000	1.258.273
SD Muh. Gendeng	196	Dana Masyarakat	311.392.500	1.588.737
SD Muh. Miliran	149	Dana Masyarakat	211.450.000	1.419.128
Rata-rata			1.396.088	946.122

Sumber: Olahan Data Primer: 2014

Berdasarkan rincian dari tabel perbandingan belanja dan defisit/siswa di Sekolah Dasar Swasta (Muhammadiyah) jumlah rata-rata defisit/siswa dari empat Sekolah yaitu Rp. 946.122, Kekurangan terbesar terlihat pada Sekolah Muhammadiyah Gendeng yaitu kekurangan sebesar Rp.1.588.737. berdasarkan kekurangan tersebut bahwa bila dibandingkan dengan pembiayaan siswa dari BOS belum mencukupi bagi siswa secara merata. Berbeda dengan sekolah-sekolah Negeri yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN), maka Sekolah-sekolah swasta mengandalkan berbagai sumbangan untuk menutupi kekurangan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah maka Sekolah Swasta mengandalkan dana yang berasal dari masyarakat untuk membangun gedung dan memenuhi

210 perlengkapannya, sumber dana sekolah swasta memiliki sumber dana dengan komposisi bervariasi.

TABEL 7 PERBANDINGAN BELANJA DAN UNIT COST DI SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA

Sekolah Dasar Negeri				Sekolah Dasar Swasta			
Nama Sekolah	Jumlah siswa	Belanja	Unit Cost	Nama Sekolah	Jumlah siswa	Belanja	Unit Cost
SDN Suryowijayan	133	735.638.813	5.531.199	SDMuh. Jogokariyan	88	100.819.950	1.145.681
SDN Patangpuluhan	139	538.021.765	3.870.660	SDMuh. Purwodiningratan 1	139	174.900.000	1.258.273
SDN Jetisharjo	388	1.310.399.568	3.377.318	SDMuh. Gendeng	196	311.392.500	1.588.737
SDN Gedongkuning	351	2.144.894.312	6.110.810	SDMuh. Miliran	149	211.450.000	1.419.128
Rata-rata		1.182.238.615	4.722.477	Rata-rata		199.640.613	1.352.955

Sumber: Olahan Data Primer: 2014

Berdasarkan tabel tersebut bila dibandingkan pembiayaan siswa dari BOS belum mencukupi bagi siswa secara merata. Rata-rata jumlah belanja di Sekolah Dasar Negeri yaitu sebesar Rp. 1.182.238.615 dengan rata-rata unit cost sebesar Rp. 4.722.477. Sekolah Dasar Negeri ini hampir seluruh operasionalnya dibiayai oleh Anggaran Belanja Negara (APBN). Sedangkan Sekolah Swasta Rata-rata jumlah belanja yaitu sebesar Rp. 199.640.613 dengan rata-rata unit cost sebesar Rp. 1.352.955. Salah satu pembiayaan yang besar adalah pembangunan sarana dan prasarana, terutama gedung dan segala perlengkapannya. Sekolah Swasta hanya mendapat sedikit bantuan dari Pemerintah sehingga untuk pembiayaan operasional Sekolah keseluruhan dibebankan kepada siswa. Sekolah swasta mengandalkan berbagai sumbangan untuk membangun gedung dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Berikut rincian alokasi dana sarana dan prasaranapada Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Dasar Muhammadiyah sebagai berikut:

TABEL 8. ALOKASI DANA SARANA DAN PRASARANA SDN DAN SD SWASTA

Sekolah Negeri				Sekolah Swasta			
Sekolah Negeri	Jumlah Pendapatan	Alokasi Dana untuk Sarana dan Prasarana	%	Sekolah Swasta	Jumlah Pendapatan	Alokasi Dana untuk Sarana dan Prasarana	%
SDN Suryowijayan	Rp.735.638.813	Rp. 17.000.000	2,31	SDMuh. Jogokaryan	Rp. 304.757.950	Rp. 65.868.000	21,61
SDN Patangpuluh an	Rp. 538.021.765	Rp. 17.237.000	3,20	SDMuh. Purwodiningratan 1	Rp. 493.229.100	Rp. 24.480.000	4,96
SDN Jetisharjo	Rp. 1.310.399.568	Rp. 47.880.600	12,83	SDMuh. Gendeng	Rp. 635.929.700	Rp. 71.730.000	11,28
SDN Gedongkuning	Rp. 2.144.894.312	Rp. 43.091.700	2,01	SDMuh. Miliran	Rp. 312.050.000	Rp. 15.000.000	4,81

Sumber: Olahan Data Primer: 2014

Jumlah persentase alokasi untuk kebutuhan sarana dan prasarana yang paling tinggi dilakukan oleh SDN Jetisharjo sebesar 12,83% dari seluruh pendapatan sekolah. Sementara itu jumlah alokasi untuk kegiatan sarana dan prasarana yang paling sedikit persentasenya yaitu SDN Gedongkuning yakni sebesar 2,01% dari seluruh pendapatan.

Sedangkan pada Sekolah Dasar Muhammadiyah sumber dana terbesar yaitu terdapat pada SD Muhammadiyah Jogokaryan dengan persentase 21,61%, Sementara itu jumlah alokasi untuk kegiatan sarana dan prasarana yang paling sedikit persentasenya yaitu Sekolah Dasar Muhammadiyah Miliran dengan persentase 4,81%.

Salah satu pembiayaan yang besar adalah pembangunan sarana dan prasarana, terutama gedung dan segala perlengkapannya. Berbeda dengan Sekolah-sekolah Negeri yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN), maka Sekolah-sekolah Swasta mengandalkan berbagai sumbangan untuk membangun gedung dan memenuhi perlengkapannya. Selain sumber dana dari APBD pemenuhan sarana dan prasarana SD Muhammadiyah berasal dari sumber dana lainnya seperti (sumbangan orang tua, Iuran Qurban, uang pengembangan gedung, dana komite, amal jariah/ bantuan khusus dan lain-lain).

Pemenuhan standar sarana dan prasarana Sekolah sebenarnya

212 dimaksudkan untuk mewujudkan Sekolah terstandar sehingga perlu membutuhkan percepatan, khususnya di Sekolah Swasta yang kecil, sebagai konsekuensi layanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, karena sarana dan prasarana pendidikan yang standar di Sekolah akan berdampak pada peningkatan kualitas proses pembelajaran pada mutu pendidikan.

PROCESS EVALUATION (EVALUASI PROSES)

- a. Sekolah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan program wajib belajar 9 tahun

Dalam melaksanakan kegiatan program wajib belajar 9 tahun maka Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Muhammadiyah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) disusun untuk mempermudah dalam melaksanakan kegiatan. Namun demikian jika tidak dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) bisa saja menggunakan Petunjuk Teknis (JUKNIS) yang telah disusun oleh instansi tertentu yang menjadi dasar bersama dalam melaksanakan program wajib belajar.

- b. Terbentuknya tim atau panitia penanggung jawab program wajib belajar di masing-masing Sekolah

Selanjutnya program wajib belajar harus ada kepengurusannya sebagai penanggungjawab program. Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang penanggungjawab terhadap pelaksanaan program wajib belajar. Berjalan atau tidaknya program tersebut tergantung kerjasama yang baik dan pembagian kewenangan dan tanggungjawab terhadap kedua instansi tersebut. Sementara program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur pendidikan informal maupun pendidikan formal Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Dasar Negeri. Sementara di masing-masing Sekolah tim program wajib belajar melibatkan guru dan karyawan untuk menjalankan dan mengawasi program wajib belajar 9 tahun.

- c. Tercapainya target waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan

Waktu terhadap pelaksanaan kegiatan program wajib belajar secara eksplisit tidak ada jadwal yang ditentukan. Namun di masing-masing Daerah selalu menyusun kalender pendidikan untuk mengatur jadwal pelaksanaan tahapan-tahapan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan di Daerah tersebut. Di Kota Yogyakarta kalender pendidikan tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kalender pendidikan disusun untuk mengatur pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Kota Yogyakarta sehingga program wajib belajar juga bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Masing-masing Sekolah Negeri dan Swasta mengikuti kalender pendidikan tersebut sudah tercapai waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan.

PRODUCT EVALUATION (EVALUASI HASIL)

a. Tercapainya nilai standar kelulusan Kota Yogyakarta

TABEL 9. DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA TAHUN 2013/2014 KOTA YOGYAKARTA

Sekolah Negeri				Sekolah Swasta			
Nama Sekolah	Jumlah Peserta	Total nilai	Rangking Sekolah	Nama Sekolah	Jumlah Peserta	Total nilai	Rangking Sekolah
SDN Suryowijayan	30	25.43	25	SD Muh Jogokariyan	23	23.35	82
SDN Patangpuluhan	14	21.43	132	SD MuhPurwodiningratan 1	32	25.00	39
SDN Jetisharjo	76	25.40	28	SD Muh Gendeng	41	25.93	12
SDN Gedongkuning	63	25.06	38	SD MuhMiliran	28	21.69	126

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2014

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa, peringkat kelulusan dengan nilai tertinggi setelah dilakukan perbandingan maka, Sekolah Dasar Muhammadiyah Gendeng menempati urutan tertinggi diantara beberapa Sekolah yang menjadi objek penelitian yakni dengan nomor urut/ rangking Sekolah nomor 12 (dua belas) total

214 nilai 25,93. Sedangkan rangking paling bawah ditempati oleh Sekolah Dasar Negeri Patangpuluhan dengan rangking Sekolah nomor 132 dengan total nilai 21,43. Dengan demikian dapat diketahui bahwa rangking kelulusan dengan nilai tertinggi Sekolah Negeri tidak selamanya lebih baik daripada Sekolah Swasta begitu pula sebaliknya. Hasil Kelulusan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir (NA) pada Sekolah Negeri dan Swasta tahun 2013 belum sepenuhnya mencapai 100%. Namun, untuk Sekolah Dasar Negeri dan Swasta hasil kelulusan UN di Kota Yogyakarta mencapai 100%.

b. Tercapainya standar nilai rata-rata nasional

TABEL 10. NILAI UJIAN NASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA (UN) TAHUN 2014

Sekolah Negeri			Sekolah Swasta		
Nama Sekolah	Rerata nilai UN	Total nilai	Nama Sekolah	Rerata nilai UN	Total nilai
SDN Suryowijayan		25.43	SD Muh Jogokariyan		23.35
SDN Patangpuluhan	7,56	21.43	SD Muh Purwodiningratan 1	8,01	25.00
SDN Jetisharjo		25.40	SD Muh Gendeng		25.93
SDN Gedongkuning		25.06	SD Muh Miliran		21.69

Sumber: Olahan Data Primer: 2014

Rata-rata nilai Ujian Nasional yang diperoleh dari Sekolah Dasar Swasta lebih tinggi dibandingkan dengan Sekolah Dasar Negeri. Sekolah Dasar Swasta rerata nilai Ujian Nasional 8,01 sementara itu Sekolah Dasar Negeri rerata nilai Ujian Nasional 7,56.

c. Pihak Sekolah membebaskan SPP bagi siswa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar dalam bab IV pasal 9 Penjaminan Wajib Belajar pada ayat (1) yang berbunyi Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Selain daripada itu, diharapkan program BOS juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di Sekolah dengan adanya bantuan dari pemerintah dana BOS sehingga para orang tua tetap terbantu sekalipun sebagian Sekolah Dasar (SD) Swasta dikategorikan mahal pembiayaannya. Besaran BOS yang diterima oleh Sekolah, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa di Sekolah Dasar Negeri tidak menarik SPP bagi siswa, karena sudah ada dana BOS. Berbeda dengan Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Dasar Swasta (muhammadiyah) bahwa masih menarik biaya SPP atau dipungut dari siswa, untuk besaran nominal di Sekolah Dasar Muhammadiyah setiap Sekolah berbeda-beda.

d. Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Yogyakarta

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta tahun 2013 jumlah penduduk usia sekolah antara 7-8 tahun sebanyak 66.796 orang. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Pendidikan jumlah penduduk usia Sekolah yang bersekolah baik didalam maupun di luar Kota Yogyakarta sebanyak 61.455 peserta didik. Maka, pada tahun 2013 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Yogyakarta adalah sebesar 92%. Angka tersebut memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 91% dengan rincian sebagai berikut:

$$APS = \frac{61.455}{66.796} \times 100 = 92,00 \%$$

e. Rendahnya Angka Putus Sekolah (APTs) di Kota Yogyakarta

Angka Putus Sekolah (APTs) di Kota Yogyakarta pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Swasta yaitu sebagai berikut:

TABEL 11 ANGKA PUTUS SEKOLAH (APTS) SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DAN SWASTA

Sekolah Negeri		Sekolah Swasta	
Nama Sekolah	Persentase	Nama Sekolah	Persentase
SDN Suryowijayan	0%	SD MuhJogokariyan	0%
SDN Patangpuluhan	0,01%	SD Muh Purwodiningratan 1	0,01%
SDN Jetisharjo	0%	SD Muh Gendeng	0%
SDN Gedongkuning	0%	SD Miliran	0%

Sumber: Olahan Data Primer: 2014

Berdasarkan tabel tersebut Angka Putus Sekolah (APTs) pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Patangpuluhan yaitu 0,01%. Penyebabnya adalah siswa tersebut sudah tidak mau lagi untuk belajar, dikarenakan kurangnya dukungan, motivasi, perhatian dari orang tua siswa. Karena kondisi orang tua siswa yang *broken home*. Sedangkan pada Sekolah Dasar Swasta Muhammadiyah yaitu terdapat pada Sekolah Muhammadiyah Purwodiningratan1 yaitu sebesar 0,01%, dikarenakan siswa tidak mau melanjutkan karena ketidakmampuan siswa untuk mengikuti pelajaran di Sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan dalam tesis ini terkait evaluasi program wajib belajar 9 tahun pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Dasar Swasta (Muhammadiyah) di Kota Yogyakarta diukur dengan menggunakan beberapa variabel dan indikator sebagai berikut:

A. *CONTEXT*, DIUKUR DENGAN INDIKATOR:

1. Peraturan-peraturan tentang program wajib belajar, pada proses pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam melaksanakan program wajib belajar 9 tahun pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar baik Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta telah sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

2. Teridentifikasinya konteks-kontek yang belum terpenuhi, konteks jumlah tenaga pendidikan sesuai kualifikasi tidak mencapai target hanya 40%.
3. Jumlah siswa yang menjadi sasaran wajib belajar, bahwa kuota penerimaan peserta didik baru masih ada dua Sekolah yang belum memenuhi target yaitu pada SDN Patangpuluhan dan SDN Suryowijayan Sedangkan pada Sekolah Dasar Swasta ada dua Sekolah yang belum memenuhi target yaitu pada Sekolah Dasar Muhammadiyah Jogokaryan dan Sekolah Dasar Muhammadiyah Miliran.
4. ketercapainya tujuan wajib belajar, bahwa pada SDN dan Swasta (Muhammadiyah) yaitu semua siswa kelas enam lulus Ujian Nasional (UN) 100%, melanjutkan ke jenjang (SMP) dan tidak ada anak yang putus yang putus Sekolah.

B. INPUT, DIUKUR DENGAN INDIKATOR:

1. Sumber daya manusia, dari keempat SDN sebagian besar berkualifikasi Strata 1 dan ada juga yang Diploma IV. Sekolah Dasar Swasta tenaga kependidikan dengan kualifikasi dibawah Strata 1 (satu) dan Diploma IV (empat) cukup signifikan.
2. Sarana dan prasarana, pada SDN Patangpuluhan belum sepenuhnya memenuhi standar sarana dan prasarana yang telah ditentukan. Sedangkan Sekolah Dasar Swasta yang belum memenuhi standar sarana dan prasarana terdapat pada Sekolah Dasar Muhammadiyah Purwodiningratan 1 dan Sekolah Dasar Muhammadiyah Miliran.
3. Sumber dana/anggaran, di SDN yaitu bersumber dari (APBD) dan (APBN). Sedangkan Sekolah Swasta sumber dari dana/anggaran (APBD) dan (APBN) selain itu berasal dari berbagai sumbangan (sumbangan orang tua, SPP, Iuran Qurban, uang pengembangan gedung, amal jariah/ bantuan khusus dan lain-lain).

C. *PROCESS*, DIUKUR DENGAN INDIKATOR:

1. Penanggungjawab/program tim wajib belajar, dalam pelaksanaannya tidak ada tim khusus untuk penanggungjawab dalam melaksanakan program wajib belajar baik di SDN maupun di Sekolah Dasar Swasta.
2. Waktu pelaksanaan wajib belajar, di SDN dan Sekolah Dasar Swasta mengikuti jadwal kelender pendidikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- d. *Product*, diukur dengan indikator:
 1. Nilai Ujian Nasional (UN), peringkat kelulusan dengan nilai tertinggi yaitu Sekolah Dasar Muhammadiyah Gendeng dengan nomor urut/ ranking Sekolah nomor 12 (dua belas) total nilai 25,93. Sedangkan ranking paling bawah ditempati oleh SDN Patangpuluhan dengan ranking Sekolah nomor 132 dengan total nilai 21,43. Hasil kelulusan UN di Kota Yogyakarta untuk SDN dan Swasta mencapai 100%.
 2. Uang Sekolah tidak dipungut, di SDN tidak memungut uang Sekolah dari siswa. Sedangkan Sekolah Dasar Swasta (muhammadiyah) masih menarik biaya SPP dari siswa, untuk besaran nominalnya setiap Sekolah berbeda-beda.
 3. Nilai rata-rata kelulusan, rata-rata nilai Ujian Nasional yang diperoleh dari Sekolah Dasar Swasta lebih tinggi dibandingkan dengan SDN. Sekolah Dasar Swasta rerata nilai Ujian Nasional 8,01 sementara itu SDN rerata nilai Ujian Nasional 7,56.
 4. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), APK di Kota Yogyakarta adalah sebesar 92%. Angka tersebut memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 91%.
 5. Angka Putus Sekolah (APTs), terdapat pada Sekolah Dasar Negeri Patangpuluhan sebesar 0,01% dan pada Sekolah Dasar Swasta Muhammadiyah Purwodiningratan 1 sebesar 0,01%. Dengan melihat kondisi yang ada, maka dapat dirumuskan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Model evaluasi program yang dikembangkan oleh Stufflebeam (1967) mencakup *Context, Input, Process, Product* (CIPP) efektif. Namun perlu dilakukan penelitian selanjutnya lebih mendalam terkait evaluasi program khususnya pada konteks yang melatari, komponen input yang mendukung, komponen proses yang menunjang, dan hasil dari komponen produk dikarenakan keterbatasan sumber referensi yang membahas hal tersebut.
2. Melihat konteks jumlah tenaga pendidikan sesuai kualifikasi tidak mencapai target. Maka Dinas Pendidikan perlu dilakukan terobosan-terobosan besar dan strategi agar target-target yang belum tercapai bisa terpenuhi dimasa yang akan datang.
3. Bahwa kuota penerimaan peserta didik baru di SDN dan Sekolah Dasar Muhammadiyah masih ada yang belum mencapai target maka seharusnya Dinas Pendidikan harus meninjau dan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di Sekolah.
4. Standar sarana dan prasarana belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan Sekolah baik di SDN maupun di Sekolah Dasar Muhammadiyah maka Dinas Pendidikan perlu memperhatikan dan pengecekan langsung di Sekolah khususnya Sekolah yang letaknya kurang strategis demi terwujudnya kebutuhan Sekolah dan kenyamanan siswa dalam kegiatan belajar dan mengajar untuk menggunakan sebaik-baiknya fasilitas yang ada di Sekolah.
5. Masih adanya Angka Putus Sekolah (APTs) pada SDN dan Sekolah Dasar Swasta Muhammadiyah maka Dinas Pendidikan dan pihak Sekolah saling bekerjasama untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arikunto, Suharsini dan Safruddin. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Edisi ke 2. Jakarta: Bumi Aksara.

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. Kota Yogyakarta Dalam Angka.
- Budiraharjo, Markus dkk. 2013. *Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun Pada Sekolah- Sekolah Swasta (Studi Kasus Di Sekolah-Sekolah Katholik Dan Muhammadiyah Di Provinsi Diy Dan Jawa Tengah)*.
- Dedi, Saputra. 2012. *Evaluasi Pelaksanaan Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun Pada Pondok Pesantren Salafiyah Al-Iman Pegayaman Sukasada Buleleng*.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga.
- Intzar, Hussain Butt. 2013. *Restructuring Compulsory Education in Pakistan in the Post-eighteenth Constitutional Amendment Era: Insights from the Region and Developed Nations*.
- Jeki. 2011. *Perencanaan Penanggulangan Siswa Putus Sekolah, Pada Tingkat Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Agam*.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 2013. Dinas Pendidikan (DISDIK) Kota Yogyakarta.
- Posavac. J. Emil. 2014. *Program Evaluation: Methods and Case Studies*, Eighth Edition, Pearson.
- Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2014.
- Sa'ud, Udin Syaefudin. 2008. *Substansi Pendidikan Dasar Dalam Program Wajib Belajar 9 Tahun*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cet. ke-3, Bandung: Alfabeta.
- Stanislaus, Kadingdi. 2003. *Policy Initiatives For Change And Innovation In Basic Education Programmes In Ghana*.

JURNAL

- Anggraini Eka dan Maryani. 2013. "Evaluasi Program Bos Dalam Peningkatan Sarana Pendidikan". *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Volume 1, Nomor 2, Maret 2013.
- Aulia, Sitta. 2007. "Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan)". <http://journal.unair.ac.id>.
- Firmansyah, Ferry. "Perkembangan Wajib Belajar 9 Tahun Di Indonesia Periode 1994-2008". *VATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* Volume 1, No 2, Mei 2013
- Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas. 2009. "Evaluasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun". <http://www.bappenas.go.id>
- Suhariyanto, Didik. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Biaya Pendidikan Dan Kesehatan Gratis Di Kabupaten Banyuwangi". *Jurnal Ilmiah PROGRESSIF*, Vol.4 No.11, Agustus 2008.